

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BP4
PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Hanif Afandi

NIM. C91217126



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Moh Hanif Afandi

NIM : C91217126

Fakultas / Jurusan / Prodi: Syariah & Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Keluarga

JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA kec
Babat kab Lamongan Dalam Mengatasi Problematika
Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 27 Januari 2022

Saya yang menyatakan,


Moh Hanif Afandi
Nim. C91217126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19” ditulis oleh Moh Hanif Afandi NIM C91217126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi ini di tulis oleh Mohammad Hanif Afandi NIM. C91217126 ini telah di pertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, 15 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dra. Hj Siti Dalilah Candrawati M.AG.

NIP. 196006201989032001

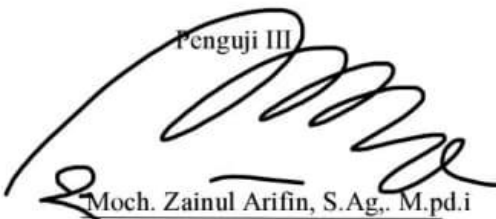
Pengui II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

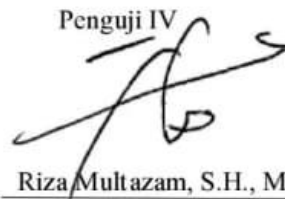
Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.pd.i

NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Riza Multazam, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Dr. A. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Hanif Afandi
NIM : C91217126
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hanifafandi20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2022

Penulis

(Mohammad Hanif Afandi)

BAB III PERAN BP4 KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19	45
A. Profil BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan	45
1. Profil KUA dan BP4 Kec. Babat.....	45
2. Struktur Kepengurusan BP4 Kec. Babat Kab. Lamongan.....	46
B. Implementasi Tugas dan Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan.....	49
1. Tugas BP4 KUA Kec. Baba Kab. Lamongan	49
2. Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19	63
A. Analisis Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19	63
B. Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada Kua Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19	75
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

diperlukan hadirnya pihak ketiga yang bertindak selaku hakam (juru damai), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Apalagi jika takut terjadi perdebatan di antara keduanya, kirimkan hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud memperbaiki, kemungkinan besar Allah SWT akan memberikan taufik kepada pasangan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”⁷

Dalam ayat tersebut, hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Perceraian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga, mulai keluarga yang baru menikah hingga pada keluarga yang lama menikah.

Undang-Undang yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pedoman pelaksana sebagai Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya berhasil mengontrol masalah pendaftaran hubungan, metodologi untuk pelaksanaan hubungan, terpisah dari strategi, cara merekam setelan perpisahan, periode kecantikan bagi wanita yang mengalami

⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., 35.

Kecamatan Babat menempati urutan pertama dalam jumlah akta cerai tertinggi dari 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu sejumlah 164 akta cerai.

Tingginya angka perceraian di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dimas Prakarsa, S.H. selaku Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat “Akibat banyaknya perceraian di Kecamatan Babat yakni dari faktor ekonomi yang semenjak covid ini banyak pengurangan pegawai, jadi keekonomian mereka yang semakin menurun akhirnya kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.”¹⁶

Salah satu pondasi agar masyarakat bisa kokoh adalah sebuah perkawinan, jika perkawinan runtuh maka sendi-sendi masyarakat juga ikut runtuh. Oleh karena itu, sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh dan suami istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga.¹⁷ Dampak perceraian bagi suami dan istri yaitu apabila mereka bercerai tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hanya berdasarkan hukum Islam (melalui perkataan) maka mereka tidak mempunyai akta cerai atau bukti yang mengatakan bahwa mereka resmi bercerai maka akan menyebabkan kesulitan saat mereka akan menikah lagi dengan orang lain.¹⁸

¹⁶ Wawancara Pribadi, Dimas Prakarsa, S.H. Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

¹⁷ ¹⁷ Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, 21-22.

¹⁸ Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, 221-222.

2. Skripsi Muhammad Jauhari pada Tahun 2002 yang berjudul “Peranan BP4 Dalam Mengatasi Tradisi Kawin Cerai di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kebiasaan yang menimbulkan adanya kawin cerai di desa tersebut karena sudah dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah Kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam, hukum positif dan hukum yang berlaku. Adapun peran BP4 dalam menekan angka kawin cerai di desa tersebut adalah memberikan penerangan, penasehatan, dan pendidikan tentang perkawinan menurut hukum islam dan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian, sehingga tradisi kawin cerai di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berangsur-angsur mulai menurun.²³
3. Skripsi oleh Desy Yosy Rosikhoh pada Tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam mengatasi problematika perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan lebih memilih bersifat preventif yaitu sebagai pencegah dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi. Hal ini dikarenakan masyarakat kedua wilayah ini lebih memilih mendatangi ulama / kyai yang mereka segani dan hormati apabila mulai terdapat

²³ Muhammad Jauhari, “Peranan BP4 Dalam Mengatasi Tradisi Kawin Cerai Di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 14.

3. Tujuan dan Visi Misi BP4

a. Tujuan BP4

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan, berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.³⁵

b. Visi dan Misi BP4

Visi dan Misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah.
- 2) Misi BP4 adalah:
 - a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
 - b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.³⁶

³⁵ BP4, Munas BP4 14 tahun 2009, BKM Pusat, Jakarta.

³⁶ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

Menurut Bapak Ketua BP4 Kecamatan Babat (Drs. Ali Yanto, M.Ag.), bahwa Peran BP4 di KUA Kecamatan Babat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama yang memiliki bidang-bidang di setiap permasalahannya dan melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.⁵⁶ Berikut peran BP4 di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dari masing-masing bidang :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkawinan

Pada bidang ini BP4 KUA Kec. Babat melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada calon pengantin atau bisa disebut dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BINWIN). BINWIN dilaksanakan selama tiga hari sebelum calon pasangan pengantin melanjutkan ke jenjang pernikahan. BINWIN dilaksanakan masing-masing angkatan berjumlah 15 pasang calon pengantin atau 30 orang peserta. Kegiatan berlangsung *full day* terjadwal mulai pukul 08.00 WIB sampai 19.00 WIB. Tujuan dilaksanakannya BINWIN yaitu tercapainya fondasi keluarga yang sakinah dengan membekali ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan kepada calon pengantin.

Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan BINWIN antara lain cara-cara mempersiapkan perkawinan yang kokoh hingga terbentuk keluarga yang sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dinamika kehidupan setelah menikah, kesehatan reproduksi, dan cara mencetak generasi yang berkualitas. BP4 juga menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari Rabu.

⁵⁶ Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto, M.Ag. Kepala KUA Kecamatan Babat. Senin 05 Juni 2020.

